



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Pekanbaru, Desember 2020

Pihak Kedua,


dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001

Pihak Pertama,


Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM
NIP 196607171991022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Nasional	Target Provinsi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Pembinaan Gizi Masyarakat	1.	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi	70%	70%
		2.	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan tata laksana gizi buruk pada balita	20%	20%
		3.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	45%	45%
2.	Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir	200 Kab/Kota	12 Kab/Kota
		2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan balita	200 Kab/Kota	12 Kab/Kota
		3.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	150 Kab/Kota	12 Kab/Kota
		4.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	200 Kab/Kota	12 Kab/Kota
		5.	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia	50%	50%
3.	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja	334 Kab/Kota	7 Kab/Kota
		2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga	334 Kab/Kota	7 Kab/Kota
4.	Penyehatan Lingkungan	1.	Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	50%	50%
		2.	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	220 Kab/Kota	5 Kab/Kota
		3.	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	64%	64%
		4.	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	3000 fasyankes	155 Fasyankes
		5.	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	44%	44%
		6.	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	60%	60%
5.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	35%	25%
		2.	Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	70%	40%
6.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1.	Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat	57,5	57,5
		2.	Persentase kinerja RKAKL lingkup Kesehatan Masyarakat	85%	85%

Program

1. Program Kesehatan Masyarakat
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 9.065.973.000
Rp. 674.502.000

Pekanbaru, Desember 2020

Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat



dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Riau



Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM
NIP 196607171991022001